

Indonesia Economic and Development Outlook 2026

Tahun 2026 dan Transisi Indonesia Menuju Negara Berpendapatan Tinggi

Muhyiddin Martain^{1*}¹ Chief Editor – The Indonesian Journal of Development PlanningKorespondensi: ^{1*} udyn@bappenas.go.id <https://doi.org/10.47266/bwp.v9i1.534> | halaman: 3 - 14

Abstrak

Selama lebih dari dua dekade, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5 persen kerap dipandang sebagai simbol stabilitas dan ketahanan makroekonomi. Namun, memasuki tahun 2026, pertanyaan kebijakan yang semakin relevan bukan lagi apakah pertumbuhan tersebut dapat dipertahankan, melainkan apakah laju pertumbuhan itu masih memadai bagi ekonomi yang tengah berupaya naik kelas dan keluar dari jebakan pendapatan menengah. Artikel ini berangkat dari argumen bahwa pertumbuhan “cukup baik” tidak lagi cukup. Tahun 2026 memiliki arti strategis sebagai tahun awal konsolidasi pelaksanaan RPJMN 2025–2029, yang secara eksplisit menargetkan percepatan pertumbuhan ekonomi menuju kisaran 7–8 persen untuk menopang visi Indonesia Emas 2045. Pada saat yang sama, lingkungan global tidak lagi memberikan dorongan kuat, ditandai oleh perlambatan pertumbuhan dunia, fragmentasi perdagangan, ketidakpastian geopolitik, serta transisi energi dan digital yang berlangsung cepat. Proyeksi lembaga internasional menunjukkan bahwa pertumbuhan Indonesia pada 2026 masih berada di sekitar 5 persen, mencerminkan keterbatasan mesin pertumbuhan yang terlalu bergantung pada konsumsi domestik dan komoditas. Oleh karena itu, artikel ini menekankan pentingnya pergeseran menuju pertumbuhan berbasis produktivitas melalui peningkatan kualitas investasi, penguatan manufaktur bernilai tambah, akselerasi pembangunan sumber daya manusia, serta reformasi kelembagaan. Dengan demikian, 2026 diposisikan sebagai titik pijak krusial untuk mengubah stabilitas menjadi akselerasi dan menata ulang arah pembangunan ekonomi Indonesia secara lebih berkualitas dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Indonesia Economic Outlook 2026; RPJMN 2025–2029; middle-income trap; productivity-driven growth; Indonesia Emas 2045.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

I. Pendahuluan

Selama lebih dari dua dekade, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5 persen sering dipandang sebagai capaian yang stabil dan membanggakan. Ia menjadi simbol ketahanan ekonomi di tengah krisis global, gejala keuangan, dan berbagai tekanan eksternal. Namun, memasuki tahun 2026, pertanyaan yang semakin relevan bukan lagi apakah Indonesia mampu menjaga pertumbuhan tersebut, melainkan apakah pertumbuhan 5 persen masih cukup untuk menopang ambisi Indonesia sebagai ekonomi yang sedang naik kelas. Dalam konteks ini, Outlook 2026 berangkat dari satu tesis utama bahwa pertumbuhan yang selama ini dianggap “cukup baik” tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan pembangunan Indonesia ke depan.

Tahun 2026 menempati posisi strategis dalam perjalanan pembangunan nasional. Ia berada di awal pelaksanaan RPJMN 2025–2029, periode yang secara eksplisit menargetkan percepatan pertumbuhan ekonomi hingga mendekati 8 persen pada akhir dekade. Target tersebut bukan sekadar proyeksi optimistis, tetapi refleksi dari kebutuhan struktural. Dengan pertumbuhan sekitar 5 persen, ruang fiskal terbatas, penciptaan lapangan kerja berkualitas berjalan lambat, dan upaya mengejar pendapatan per kapita negara berpendapatan tinggi menjadi semakin panjang. Bagi ekonomi yang tengah bertransisi, bertahan pada pertumbuhan moderat justru berisiko memperpanjang jebakan pendapatan menengah.

Di saat yang sama, lanskap global tidak menawarkan kenyamanan. Perlambatan ekonomi dunia, fragmentasi perdagangan, ketidakpastian geopolitik, serta transisi energi dan digital yang berlangsung cepat membentuk lingkungan eksternal yang penuh risiko sekaligus peluang. Dalam situasi seperti ini, pertumbuhan 5 persen yang terlalu bergantung pada konsumsi domestik menjadi semakin rapuh. Indonesia dituntut untuk membangun sumber pertumbuhan baru yang lebih produktif, berdaya saing, dan terintegrasi dengan perubahan struktur ekonomi global.

Indonesia Economic and Development Outlook 2026 hadir untuk membaca persimpangan ini. Outlook ini berupaya menjawab mengapa pertumbuhan yang lebih tinggi menjadi kebutuhan, bukan sekadar pilihan, serta bagaimana pertumbuhan tersebut dapat dicapai tanpa mengorbankan stabilitas dan inklusivitas. Dengan mengkaji dinamika makroekonomi, kebijakan fiskal dan moneter, investasi dan perdagangan, transformasi sektoral, hingga risiko bencana dan ketahanan ekonomi, Outlook ini menempatkan tahun 2026 sebagai momen refleksi sekaligus koreksi arah.

Pada akhirnya, pertanyaan kunci yang ingin dijawab bukanlah apakah Indonesia mampu tumbuh lebih cepat secara angka, melainkan apakah Indonesia sanggup **mengubah kualitas pertumbuhan** agar benar-benar mendorong produktivitas, memperluas kesempatan kerja yang layak, dan memperkuat ketahanan sosial serta lingkungan. Di sinilah makna sejati dari Outlook 2026: sebuah ajakan untuk melampaui kenyamanan pertumbuhan 5 persen dan berani mendefinisikan ulang arah pembangunan ekonomi Indonesia.

II. Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Global dalam Lima Tahun Terakhir

Perkembangan ekonomi global dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan perubahan fase yang penting, dari pemulihan pascapandemi menuju periode perlambatan yang lebih struktural. Dinamika ini tidak hanya tercermin dalam fluktuasi angka pertumbuhan, tetapi juga dalam perubahan sumber pertumbuhan, arah kebijakan makroekonomi, serta meningkatnya ketidakpastian global. Memahami pola pertumbuhan ekonomi global dalam lima tahun terakhir menjadi krusial untuk menempatkan posisi masing-masing negara, termasuk Indonesia, dalam konteks yang lebih luas. Analisis ini memberikan dasar untuk menilai sejauh mana pemulihan ekonomi telah bertransformasi menjadi pertumbuhan yang berkelanjutan, bagaimana prospek

tahun 2026 terbentuk, serta tantangan strategis yang dihadapi Indonesia di tengah lingkungan global yang semakin kompleks dan kurang kondusif dibandingkan dekade sebelumnya.

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Terpilih

Negara	Angka Pertumbuhan PDB (World Bank)				Perkiraan Pertumbuhan PDB Tahun 2026			
	2022	2023	2024	2025 (Sementara)	World Bank	OECD	IMF	ADB
Indonesia	5,3	5	5	5	5,1	5	5,1	5,1
Global	3	2,6	2,7	2,6	2,7	2,8	3	2,9
Asia	4,3	4,5	4,5	4,6	4,5	4,6	4,8	4,7
Jepang	1,1	1,9	1	0,9	1	1,1	0,9	1
Korea Selatan	2,6	1,4	2,2	2,1	1,8	1,9	1,8	1,9
China	3	5,2	4,8	5	4,4	4,3	4,5	4,4
India	7	8,2	6,5	6,6	6,4	6,5	6,5	6,6
Malaysia	8,7	3,7	4,5	4,8	4,4	4,5	4,3	4,4
Thailand	2,5	2,5	2,1	1,8	1,7	2	1,8	1,9
Vietnam	8	5,1	6,8	5,8	6,5	6,2	6,5	6,3

Sumber: World Bank (2025); OECD (2025); IMF (2025); ADB (2025), diolah Muhyiddin (2026)

Tabel 1 menunjukkan bahwa kurun waktu lima tahun terakhir ditandai oleh fase pemulihan yang tidak linier dan semakin kehilangan momentum. Tahun 2022 mencerminkan fase *post-pandemic rebound*, ketika banyak negara mencatat pertumbuhan relatif tinggi akibat efek dasar pemulihan aktivitas ekonomi. Namun, sejak 2023 hingga 2025, laju pertumbuhan global cenderung melandai. Pertumbuhan ekonomi global turun dari sekitar 3 persen pada 2022 menjadi kisaran 2,6–2,7 persen pada 2023–2025, mencerminkan normalisasi pascapemulihan sekaligus munculnya tekanan struktural baru.

Perlambatan ini bersifat luas dan lintas kawasan. Negara-negara maju menghadapi tekanan inflasi, pengetatan kebijakan moneter, serta penurunan produktivitas jangka menengah, sementara negara berkembang menghadapi kombinasi tekanan eksternal dan keterbatasan ruang kebijakan domestik. Di Asia, meskipun kawasan ini tetap menjadi motor pertumbuhan global, lajunya juga menunjukkan tren moderasi. Pertumbuhan Asia berkembang relatif stabil di kisaran 4,3–4,6 persen, tetapi belum kembali ke dinamika pra-pandemi yang lebih tinggi.

China, sebagai ekonomi terbesar di Asia, memainkan peran penting dalam perlambatan regional. Setelah mencatat pemulihan kuat pada 2023, pertumbuhan China kembali melemah pada 2024–2025 seiring tantangan struktural di sektor properti, demografi, dan reorientasi model pertumbuhan. Negara-negara Asia Timur maju seperti Jepang dan Korea Selatan menunjukkan pertumbuhan yang lebih rendah dan volatil, mencerminkan keterbatasan permintaan domestik dan ketergantungan pada siklus global. Di sisi lain, beberapa negara Asia Selatan dan Asia Tenggara, terutama India dan Vietnam, tampil sebagai *growth outliers* dengan pertumbuhan yang relatif lebih tinggi dan konsisten.

2.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Global Tahun 2026

Memasuki 2026, seluruh lembaga internasional utama—World Bank, OECD, IMF, dan ADB—memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi global akan tetap berada pada lintasan moderat. Pertumbuhan global diperkirakan berkisar di bawah 3 persen, menandakan bahwa ekonomi dunia belum kembali ke tren jangka panjang sebelum pandemi. Risiko yang membayangi tetap signifikan, antara lain fragmentasi perdagangan, ketegangan geopolitik, transisi energi yang belum sepenuhnya mulus, serta ketidakpastian kebijakan moneter global.

Asia tetap diproyeksikan tumbuh lebih cepat dibandingkan rata-rata global, tetapi dengan laju yang lebih terkendali. China diperkirakan melanjutkan fase perlambatan struktural, sementara Jepang dan Korea Selatan tumbuh di bawah 2 persen. Sebaliknya, Indonesia, India, Vietnam, dan Malaysia tetap menjadi penopang pertumbuhan kawasan, meskipun dengan variasi kinerja dan tantangan domestik masing-masing. Gambaran ini menunjukkan bahwa 2026 bukanlah tahun akselerasi global, melainkan tahun konsolidasi dengan peluang pertumbuhan yang semakin selektif dan berbasis kualitas kebijakan domestik.

2.2. Posisi dan Tantangan Indonesia dalam Konteks Global 2026

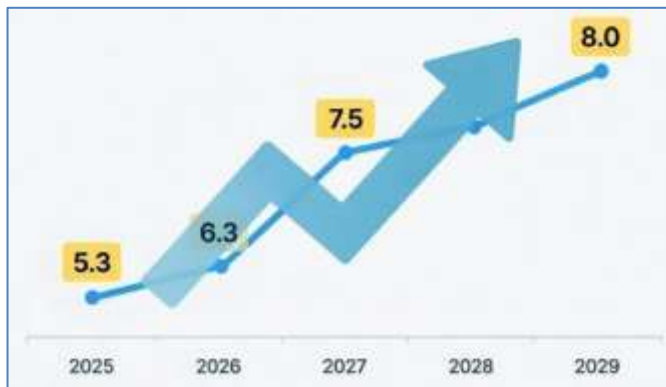
Dalam lanskap tersebut, Indonesia menempati posisi yang relatif stabil namun sekaligus menghadapi dilema strategis. Selama periode 2022–2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia konsisten berada di kisaran 5 persen, mencerminkan ketahanan makroekonomi yang kuat di tengah perlambatan global. Stabilitas ini ditopang oleh konsumsi domestik yang solid, kebijakan fiskal yang relatif pruden, serta dukungan sektor komoditas dan investasi infrastruktur.

Namun, proyeksi 2026 dari keempat lembaga internasional menunjukkan bahwa pertumbuhan Indonesia diperkirakan tetap berada di sekitar 5 persen. Konsistensi ini, meskipun positif dari sudut pandang stabilitas, juga menegaskan keterbatasan mesin pertumbuhan Indonesia dalam menghasilkan akselerasi yang signifikan. Dibandingkan dengan India dan Vietnam yang diproyeksikan tumbuh lebih cepat, Indonesia menghadapi tantangan untuk meningkatkan kontribusi investasi produktif, ekspor manufaktur bernilai tambah, dan produktivitas tenaga kerja.

Dengan demikian, Indonesia memasuki 2026 pada posisi yang relatif aman tetapi belum optimal. Pertumbuhan 5 persen cukup untuk menjaga stabilitas, namun belum memadai untuk mengejar target pembangunan jangka menengah dan aspirasi jangka panjang menuju negara berpendapatan tinggi. Dalam konteks ini, tantangan utama Indonesia bukanlah menghindari krisis, melainkan menemukan sumber pertumbuhan baru yang mampu mengangkat ekonomi ke lintasan yang lebih tinggi dan berkualitas, terutama di tengah lingkungan global yang tidak lagi memberikan dorongan kuat seperti satu dekade sebelumnya.

III. Pertumbuhan Ekonomi pada RPJMN 2025–2029

Grafik berikut menggambarkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditetapkan Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, dengan lintasan meningkat dari 5,3 persen pada 2025 hingga mencapai 8,0 persen pada 2029. Target ini secara eksplisit mencerminkan optimisme kebijakan yang disengaja (*deliberate optimism*), sebagaimana dinyatakan dalam dokumen perencanaan nasional bahwa Indonesia perlu keluar dari pola pertumbuhan moderat yang stagnan untuk mengejar sasaran Indonesia Emas 2045 (Bappenas, 2024).



Grafik 1. Target Pertumbuhan Ekonomi pada RPJMN 2025-2029

Sumber: Bappenas (2025)

Optimisme tersebut dilandasi oleh sejumlah faktor struktural. Pertama, stabilitas makroekonomi pascapandemi yang relatif terjaga, ditandai oleh inflasi yang terkendali, defisit fiskal yang kembali ke batas aman, serta ketahanan sektor keuangan. Kedua, keyakinan bahwa agenda transformasi ekonomi yang telah dimulai—khususnya hilirisasi sumber daya alam, pembangunan infrastruktur strategis, dan reformasi iklim investasi—akan mulai menghasilkan dampak yang lebih signifikan pada paruh kedua dekade 2020-an. Ketiga, bonus demografi yang masih terbuka dipandang sebagai peluang untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi, selama diiringi dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja (World Bank, 2023; OECD, 2023).

Namun, target tersebut juga harus dibaca dalam konteks dinamika global yang tidak sepenuhnya kondusif. Laporan *World Economic Outlook* menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi global cenderung melambat, dengan proyeksi jangka menengah berada di bawah rata-rata historis akibat pengetatan kondisi keuangan, fragmentasi perdagangan, serta ketidakpastian geopolitik yang meningkat (IMF, 2024). Bagi Indonesia, kondisi ini berpotensi membatasi kontribusi ekspor dan arus investasi global. Di sisi lain, pergeseran rantai pasok global dan strategi *China+1* justru membuka peluang bagi negara-negara dengan stabilitas makro dan pasar domestik besar, termasuk Indonesia, untuk menarik investasi manufaktur dan industri bernilai tambah (World Bank, 2024).

Dari perspektif domestik, pencapaian target pertumbuhan RPJMN sangat bergantung pada kemampuan Indonesia meningkatkan sumber-sumber pertumbuhan di luar konsumsi rumah tangga. World Bank (2023) menegaskan bahwa untuk mendorong pertumbuhan di atas 6 persen secara berkelanjutan, Indonesia perlu meningkatkan kontribusi investasi produktif, ekspor manufaktur, serta produktivitas total faktor (*total factor productivity*). Tanpa reformasi struktural yang lebih dalam, pertumbuhan berisiko kembali tertahan di kisaran historisnya, sebagaimana dialami banyak negara berpendapatan menengah (*middle-income trap*).

Dalam kerangka tersebut, Pemerintah menempuh sejumlah strategi utama untuk mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi RPJMN. Pertama, percepatan investasi melalui hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, pengembangan kawasan industri, serta penguatan konektivitas dan logistik nasional. Strategi ini sejalan dengan temuan OECD (2023) yang menekankan pentingnya industrial upgrading dan integrasi ke dalam rantai nilai global. Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui reformasi pendidikan, pendidikan vokasi, dan kebijakan pasar kerja aktif agar pertumbuhan tinggi sejalan dengan penciptaan lapangan kerja produktif dan inklusif. Ketiga, penguatan peran APBN sebagai instrumen

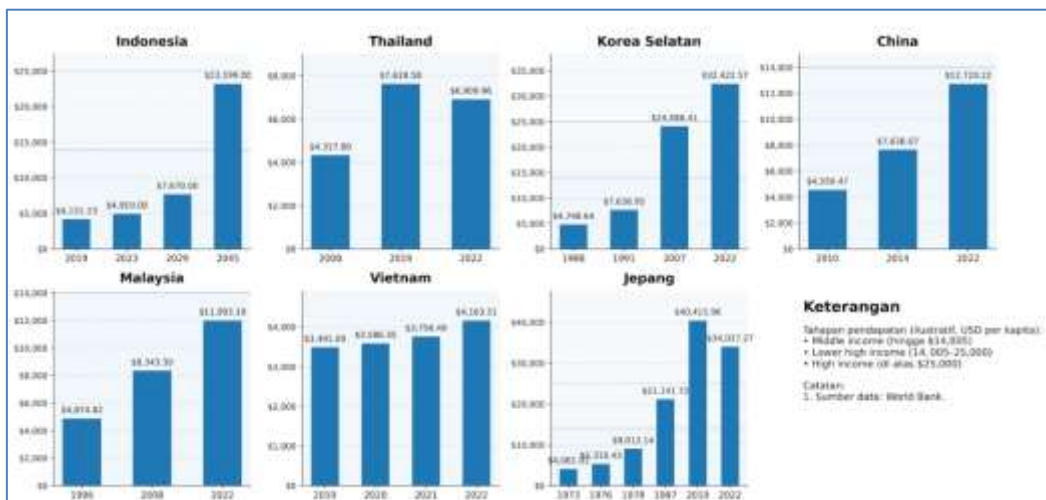
katalitik, dengan fokus pada belanja negara yang lebih produktif, efisien, dan berorientasi hasil, sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal (IMF, 2024). Keempat, reformasi kelembagaan dan pendalaman sektor keuangan untuk memperluas pembiayaan jangka panjang bagi investasi strategis.

Dengan demikian, target pertumbuhan ekonomi RPJMN 2025–2029 bukan sekadar proyeksi angka, melainkan narasi kebijakan tentang arah transformasi ekonomi Indonesia. Target ini mencerminkan ambisi untuk melampaui pertumbuhan “cukup baik” dan bergerak menuju pertumbuhan yang lebih tinggi, berkualitas, dan berkelanjutan. Tantangan utamanya terletak pada konsistensi implementasi reformasi, kemampuan mengelola risiko global, serta memastikan bahwa pertumbuhan yang dikejar benar-benar diterjemahkan menjadi peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.

IV. Transisi Pendapatan dan Dinamika Pembangunan: Pelajaran Lintas Negara Menuju Pendapatan Tinggi

Grafik 2 memperlihatkan bahwa transformasi dari negara berpendapatan rendah menuju negara berpendapatan tinggi merupakan proses historis yang panjang, tidak linier, dan sangat dipengaruhi oleh pilihan kebijakan serta kualitas institusi. World Bank mencatat bahwa sejak 1960 hanya sebagian kecil negara berpendapatan menengah yang berhasil menembus kategori negara berpendapatan tinggi secara berkelanjutan. Mayoritas lainnya mengalami perlambatan atau stagnasi pada fase menengah atas—fenomena yang dikenal luas sebagai *middle-income trap* (World Bank, 2013).

Dalam kerangka *Why Nations Fail*, Acemoglu dan Robinson (2012) menekankan bahwa perbedaan lintasan pembangunan bukan terutama disebabkan oleh faktor geografis atau budaya, melainkan oleh institusi ekonomi dan politik yang membentuk insentif bagi investasi, inovasi, dan produktivitas. Negara dengan institusi yang inklusif cenderung mampu melakukan *structural upgrading*, sementara negara dengan institusi yang ekstraktif sering kali mengalami pertumbuhan awal yang cepat tetapi rapuh dan mudah melambat ketika harus naik kelas.



Grafik 2. Perkembangan Historis Pertumbuhan Ekonomi dalam Jangka Panjang

Sumber: World Bank (2025), diolah Muhyiddin (2026)

4.1. Transisi Pendapatan Sebagai Proses Historis dan Institusional

Grafik yang dianalisis dalam sub-bab ini menampilkan perjalanan pendapatan per kapita (USD) beberapa negara Asia dari berbagai titik waktu, yang merepresentasikan tahapan pendapatan rendah, menengah, hingga tinggi. Angka-angka tersebut tidak hanya menunjukkan tingkat pendapatan, tetapi juga mencerminkan kecepatan transformasi ekonomi dan kualitas pertumbuhan jangka panjang.

4.1.1. Jepang: Transformasi Cepat Menuju Pendapatan Tinggi dan Tantangan Ekonomi Matang

Jepang merupakan contoh klasik negara yang berhasil melakukan transisi cepat dari pendapatan menengah menuju pendapatan tinggi. Data pada grafik menunjukkan bahwa pada tahun 1973 pendapatan per kapita Jepang berada pada kisaran USD 4.061. Dalam waktu relatif singkat, pendapatan ini meningkat menjadi USD 5.310 pada 1976 dan USD 9.012 pada 1978, menandai fase akselerasi industrialisasi yang sangat kuat. Lonjakan paling signifikan terjadi pada 1987, ketika pendapatan per kapita Jepang telah mencapai USD 21.142, menempatkannya secara kokoh sebagai negara berpendapatan tinggi. Pada puncaknya, tahun 2019, pendapatan per kapita Jepang mencapai USD 40.416, sebelum sedikit menurun menjadi USD 34.017 pada 2022 akibat faktor demografi dan perlambatan ekonomi global.

Keberhasilan Jepang pada fase transisi ini banyak dikaitkan dengan strategi *late industrialization* yang sistematis, peran aktif negara dalam kebijakan industri, serta investasi besar pada pendidikan dan teknologi (OECD, 2019). Jepang berhasil memanfaatkan globalisasi sebagai sarana transfer teknologi, namun tetap menjaga kapasitas industri domestik. Dalam kerangka Krugman (1994), daya saing Jepang tidak bertumpu pada upah murah, melainkan pada produktivitas dan kualitas manufaktur.

Namun, grafik juga memperlihatkan bahwa setelah mencapai pendapatan tinggi, tantangan Jepang berubah. Perlambatan pertumbuhan pendapatan per kapita pasca-1990 menunjukkan bahwa ekonomi matang menghadapi keterbatasan demografi, rigiditas struktural, dan tantangan inovasi di sektor jasa. Jepang dengan demikian memberikan pelajaran bahwa transisi menuju pendapatan tinggi dapat dicapai dengan cepat, tetapi mempertahankan dinamika pertumbuhan setelahnya memerlukan reformasi yang berbeda sifatnya.

4.1.2. Korea Selatan: Lintasan “Fast Track” Keluar dari *Middle-Income Trap*

Korea Selatan menampilkan lintasan paling cepat dan konsisten dalam grafik. Pada 1988, pendapatan per kapita Korea Selatan berada di kisaran USD 4.749—level yang sebanding dengan banyak negara berkembang saat itu. Hanya tiga tahun kemudian, pada 1991, pendapatan per kapita telah meningkat menjadi USD 7.637. Akselerasi tajam terlihat pada 2007 ketika angka tersebut melonjak menjadi USD 24.086, dan terus meningkat hingga USD 32.423 pada 2022.

Perjalanan ini menunjukkan bahwa Korea Selatan membutuhkan waktu kurang dari dua dekade untuk bergerak dari pendapatan menengah ke pendapatan tinggi. Literatur pembangunan secara luas menempatkan Korea sebagai contoh keberhasilan *developmental state*, di mana negara secara aktif mengarahkan industrialisasi, mendukung ekspor, dan mensyaratkan kinerja tinggi dari sektor swasta (Amsden, 1989; Wade, 1990). Investasi besar pada pendidikan, R&D, dan penguasaan teknologi memungkinkan Korea melakukan *industrial upgrading* yang berkelanjutan.

Dalam perspektif Acemoglu dan Robinson, Korea Selatan berhasil membangun institusi ekonomi yang relatif inklusif dan berorientasi pada produktivitas. Sementara itu, Stiglitz (2002) menekankan bahwa Korea mengelola globalisasi secara strategis: keterbukaan pasar disertai

kebijakan domestik yang kuat untuk membangun kapasitas nasional. Grafik Korea Selatan dengan demikian mencerminkan transisi yang sangat cepat, jarang terjadi, dan menuntut konsistensi kebijakan lintas dekade.

4.1.3. China: Lompatan Besar Menuju Pendapatan Menengah dan Perlambatan Struktural

China menunjukkan lintasan yang sangat impresif pada fase awal transisi. Pada 2010, pendapatan per kapita China tercatat sekitar USD 4.550. Empat tahun kemudian, pada 2014, angka ini meningkat menjadi USD 7.636, dan terus naik hingga USD 12.720 pada 2022. Kenaikan ini mencerminkan keberhasilan reformasi ekonomi, industrialisasi berbasis ekspor, serta urbanisasi masif yang mengangkat ratusan juta penduduk dari kemiskinan.

Namun, grafik juga memperlihatkan bahwa laju kenaikan pendapatan per kapita China mulai melambat ketika mendekati ambang pendapatan tinggi. Fenomena ini sejalan dengan literatur *middle-income transition*, yang menyatakan bahwa tantangan terbesar justru muncul pada fase menengah atas ketika model pertumbuhan berbasis investasi dan tenaga kerja murah kehilangan daya dorong (Eichengreen et al., 2012).

IMF dan World Bank menyoroti bahwa China kini menghadapi tantangan struktural: penuaan penduduk, ketergantungan pada sektor properti, dan kebutuhan untuk beralih ke inovasi berbasis produktivitas (IMF, 2024; World Bank, 2023). Dalam perspektif Stiglitz, tantangan China juga berkaitan dengan bagaimana mengelola globalisasi dan transformasi domestik agar pertumbuhan tetap inklusif dan stabil secara sosial.

4.1.4. Malaysia: Naik Cepat ke Menengah Atas, Lalu Melambat Menuju Pendapatan Tinggi

Malaysia menunjukkan perjalanan yang cukup cepat menuju pendapatan menengah atas, namun relatif melambat pada tahap berikutnya. Data grafik menunjukkan bahwa pada 1996 pendapatan per kapita Malaysia sebesar USD 4.875. Angka ini meningkat menjadi USD 8.343 pada 2008 dan mencapai USD 11.993 pada 2022. Meskipun kenaikan ini signifikan, Malaysia belum berhasil menembus kategori negara berpendapatan tinggi.

World Bank (2019) mencatat bahwa Malaysia menghadapi tantangan *upgrading* struktur ekonomi. Meskipun berhasil menarik FDI dan membangun basis manufaktur, pergeseran ke sektor bernilai tambah tinggi dan inovasi berjalan lebih lambat. Dalam kerangka Rodrik (2011), Malaysia menghadapi risiko *premature deindustrialization*, di mana kontribusi manufaktur stagnan sebelum ekonomi benar-benar siap beralih ke sektor berbasis pengetahuan.

Grafik Malaysia dengan demikian mencerminkan transisi yang **moderat dan cenderung melambat**, memberikan pelajaran bahwa pencapaian pendapatan menengah atas tidak otomatis menjamin keberhasilan menuju pendapatan tinggi tanpa transformasi produktivitas yang lebih dalam.

4.1.5. Thailand: Pertumbuhan Stabil tetapi Rentan Stagnasi

Thailand menampilkan lintasan yang relatif stabil tetapi tidak akseleratif. Pendapatan per kapita Thailand tercatat sebesar USD 4.328 pada 2008, meningkat tajam menjadi USD 7.629 pada 2019, namun kemudian sedikit menurun menjadi USD 6.910 pada 2022. Pola ini menunjukkan bahwa Thailand berhasil naik ke pendapatan menengah atas, tetapi menghadapi volatilitas dan keterbatasan akselerasi.

ADB (2023) dan OECD menyoroti bahwa Thailand menghadapi tantangan produktivitas, ketimpangan regional, dan ketergantungan pada sektor tertentu seperti pariwisata. Dalam kacamata Krugman, daya saing Thailand masih banyak bertumpu pada biaya dan sektor

tradisional, bukan pada inovasi dan produktivitas tinggi. Tanpa lonjakan produktivitas, lintasan Thailand berisiko stagnan di menengah atas.

4.1.6. Vietnam: Akselerasi Awal yang Cepat dan Tantangan Menengah di Depan Mata

Vietnam berada pada tahap awal hingga menengah dari transisi pendapatan. Grafik menunjukkan bahwa pendapatan per kapita Vietnam meningkat dari USD 3.491 pada 2019 menjadi USD 3.586 pada 2020, USD 3.756 pada 2021, dan USD 4.164 pada 2022. Kenaikan yang konsisten ini mencerminkan keberhasilan integrasi perdagangan dan industrialisasi berbasis ekspor.

Namun, pengalaman negara lain menunjukkan bahwa tantangan terbesar Vietnam justru akan muncul ketika memasuki fase menengah atas. OECD (2023) menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM, inovasi, dan institusi untuk memastikan Vietnam tidak terjebak pada pertumbuhan berbasis upah murah semata. Grafik Vietnam saat ini merepresentasikan fase cepat pada tahap awal, tetapi ujian struktural masih berada di depan.

V. Indonesia Menuju Negara Berpendapatan Tinggi

5.1. Posisi Indonesia dalam Lintasan Global Transisi Pendapatan

Berdasarkan lintasan pendapatan per kapita dalam grafik, Indonesia saat ini berada pada fase menengah atas awal, dengan pendapatan per kapita meningkat dari sekitar USD 4.151 pada 2019 menjadi USD 4.919 pada 2023. Proyeksi jangka menengah menunjukkan potensi peningkatan menuju sekitar USD 7.670 pada 2029 dan lebih dari USD 23.000 pada 2045. Angka-angka ini mencerminkan aspirasi kuat Indonesia untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah dan menembus kategori negara berpendapatan tinggi sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Namun, jika dibandingkan dengan lintasan historis negara-negara yang berhasil melakukan akselerasi cepat—seperti Korea Selatan atau Jepang pada fase *catch-up*—kecepatan transisi Indonesia masih tergolong lambat hingga moderat. Selama dua dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil di kisaran 5 persen, cukup untuk menjaga ketahanan makroekonomi, tetapi belum cukup untuk menghasilkan lonjakan produktivitas dan pendapatan per kapita yang dibutuhkan untuk akselerasi menuju pendapatan tinggi.

Dalam konteks ini, RPJMN 2025–2029 menjadi periode yang sangat menentukan. Dokumen perencanaan nasional tersebut secara eksplisit menaikkan ambisi pertumbuhan ekonomi menuju kisaran 7–8 persen pada akhir periode, bukan sekadar sebagai target angka, melainkan sebagai instrumen untuk mempercepat transformasi struktural ekonomi Indonesia.

5.2. Tantangan Struktural Indonesia: Mengapa Akselerasi Masih Terbatas

Sejalan dengan temuan World Bank (2020) dan literatur *middle-income trap*, keterbatasan akselerasi Indonesia dapat ditelusuri pada beberapa faktor utama. Pertama, struktur pertumbuhan yang masih berbasis permintaan domestik dan komoditas. Konsumsi rumah tangga yang kuat menjadikan ekonomi relatif tahan guncangan, tetapi tidak cukup mendorong lonjakan produktivitas. Ketika harga komoditas melemah, dorongan pertumbuhan pun melambat. Dalam kerangka Krugman (1994), persoalan utamanya bukan daya saing biaya, melainkan produktivitas dan nilai tambah.

Kedua, kontribusi manufaktur terhadap PDB yang stagnan. Berbeda dengan Korea Selatan atau China pada fase akselerasi, Indonesia belum sepenuhnya menjadikan manufaktur bernilai tambah tinggi sebagai mesin utama pertumbuhan. Hilirisasi sumber daya alam telah dimulai, tetapi dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja produktif dan *technology spillover* masih

terbatas.

Ketiga, kualitas sumber daya manusia dan pasar tenaga kerja. Meskipun bonus demografi masih terbuka, peningkatan keterampilan tenaga kerja berjalan lebih lambat dibandingkan kebutuhan transformasi industri. Tanpa lonjakan produktivitas tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi cenderung kembali ke lintasan moderat.

Keempat, tantangan kelembagaan dan koordinasi kebijakan. Dalam perspektif Acemoglu dan Robinson (2012), kualitas institusi ekonomi—kepastian regulasi, persaingan usaha, efisiensi birokrasi, dan insentif inovasi—menjadi prasyarat utama akselerasi jangka panjang. Fragmentasi kebijakan dan inkonsistensi implementasi berpotensi menghambat pembentukan ekosistem produktivitas yang kuat.

5.3. RPJMN 2025–2029 sebagai Fase Akselerasi Terencana

RPJMN 2025–2029 secara implisit dapat dibaca sebagai fase akselerasi transisi pendapatan, bukan sekadar kelanjutan dari pola pertumbuhan sebelumnya. Target pertumbuhan yang lebih tinggi mencerminkan kesadaran bahwa pertumbuhan “cukup baik” di kisaran 5 persen tidak lagi memadai untuk mengejar visi Indonesia Emas 2045. Dalam kerangka kebijakan, terdapat tiga agenda utama RPJMN yang sangat relevan untuk mempercepat lintasan pendapatan Indonesia.

Pertama, transformasi struktur ekonomi melalui industrialisasi bernilai tambah. Hilirisasi sumber daya alam diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan nilai ekspor, tetapi untuk membangun basis industri turunan, memperkuat rantai pasok domestik, dan meningkatkan produktivitas. Pelajaran dari Korea Selatan menunjukkan bahwa kebijakan industri yang efektif bukan sekadar proteksi, melainkan dukungan yang bersyarat pada kinerja dan peningkatan kapasitas teknologi (Amsden, 1989).

Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai mesin produktivitas. RPJMN menempatkan penguatan pendidikan, vokasi, dan pelatihan kerja sebagai prioritas utama. Dalam literatur pembangunan, negara yang berhasil keluar dari jebakan pendapatan menengah adalah negara yang mampu menggeser basis pertumbuhan dari tenaga kerja murah ke tenaga kerja terampil dan adaptif terhadap teknologi (World Bank, 2013; OECD, 2023).

Ketiga, penguatan institusi dan efektivitas kebijakan publik. RPJMN menekankan reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi, dan peningkatan kualitas belanja negara. Dalam kerangka Acemoglu dan Robinson, langkah-langkah ini krusial untuk membangun institusi yang lebih inklusif dan produktif, yang pada akhirnya mendorong investasi jangka panjang dan inovasi.

5.4. Jalan Menuju Indonesia Emas 2045: Dari Stabilitas ke Produktivitas Tinggi

Visi Indonesia Emas 2045 menempatkan Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi dengan struktur ekonomi modern dan inklusif. Grafik lintasan pendapatan menunjukkan bahwa target pendapatan per kapita di atas USD 20.000 pada 2045 hanya dapat dicapai jika Indonesia berhasil meningkatkan laju pertumbuhan pendapatan per kapita secara signifikan dibandingkan tren historis.

Untuk itu, agenda kebijakan perlu melampaui stabilitas dan masuk ke fase transformasi produktivitas. Pertama, Indonesia perlu menjadikan produktivitas sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan, bukan hanya pertumbuhan PDB agregat. Kedua, kebijakan industri dan perdagangan harus diarahkan untuk memperdalam integrasi Indonesia dalam rantai nilai global bernilai tambah tinggi, sejalan dengan pandangan Stiglitz (2002) dan Rodrik (2011) tentang pentingnya pengelolaan globalisasi secara strategis.

Ketiga, investasi pada inovasi, riset, dan teknologi harus meningkat secara bertahap namun konsisten. Negara-negara yang berhasil mencapai pendapatan tinggi menunjukkan komitmen jangka panjang terhadap R&D, bahkan sebelum hasilnya terlihat dalam jangka pendek. Keempat, sistem perlindungan sosial dan pasar tenaga kerja perlu diperkuat agar transformasi ekonomi berjalan inklusif dan berkelanjutan, menjaga legitimasi sosial dari agenda reformasi.

VI. Penutup: Tahun 2026 sebagai Tahun Kunci dalam Lintasan Akselerasi Pembangunan

Dalam keseluruhan kerangka RPJMN 2025–2029, tahun 2026 menempati posisi yang sangat strategis sebagai tahun awal konsolidasi sekaligus ujian dini atas ambisi akselerasi pembangunan. Jika 2025 merupakan tahun transisi perencanaan dan penyesuaian kebijakan, maka 2026 adalah tahun pertama ketika seluruh agenda RPJMN diharapkan mulai bekerja secara nyata di lapangan. Keberhasilan atau kegagalan menjaga momentum pada tahun ini akan sangat menentukan apakah target pertumbuhan yang lebih tinggi pada akhir periode RPJMN bersifat realistis atau justru kembali terkoreksi ke lintasan historis.

Tahun 2026 juga berfungsi sebagai baseline implementasi bagi visi jangka menengah dan panjang. Pada titik ini, kebijakan industrialisasi, hilirisasi, penguatan sumber daya manusia, serta reformasi kelembagaan tidak lagi dapat dinilai dari desain dan niat kebijakan, melainkan dari hasil awal (*early outcomes*) yang terukur—baik dalam bentuk peningkatan investasi produktif, perbaikan kualitas lapangan kerja, maupun kenaikan produktivitas sektoral. Literatur pembangunan menunjukkan bahwa negara yang berhasil melakukan akselerasi umumnya mampu mengamankan dua hingga tiga tahun awal reformasi sebagai periode pembentukan ekspektasi positif (*expectation setting*), yang kemudian memperkuat kredibilitas kebijakan jangka panjang (Rodrik, 2011; World Bank, 2013).

Dalam konteks Indonesia Emas 2045, tahun 2026 dapat dipandang sebagai titik pijak pertama dari lintasan dua dekade menuju negara berpendapatan tinggi. Target pendapatan per kapita di atas USD 20.000 pada 2045 mensyaratkan percepatan pertumbuhan pendapatan per kapita secara konsisten sejak dekade 2020-an. Kegagalan menciptakan akselerasi sejak awal RPJMN berisiko mendorong beban penyesuaian yang jauh lebih berat pada periode-periode berikutnya. Dengan kata lain, waktu adalah variabel kebijakan yang tidak dapat ditunda.

Lebih jauh, tahun 2026 berlangsung dalam konteks global yang tidak lagi memberikan *tailwind* kuat bagi pertumbuhan. Perlambatan ekonomi dunia, fragmentasi perdagangan, serta pengetatan ruang kebijakan global justru menuntut kapasitas domestik yang lebih kuat. Oleh karena itu, kemampuan Indonesia memanfaatkan 2026 sebagai tahun penguatan fondasi—bukan sekadar mempertahankan stabilitas—akan menentukan apakah Indonesia mampu mengubah RPJMN 2025–2029 dari dokumen perencanaan ambisius menjadi mesin akselerasi nyata menuju Indonesia Emas 2045.

Referensi

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2013). *Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty*. Crown Currency.
- Amsden, A. H. (1989). *Asia's next giant: South Korea and late industrialization*. Oxford University Press.

- Asian Development Bank. (2025). *Asian Development Outlook (ADO) December 2025: Growth Steadies But Uncertainty Lingers*. Asian Development Bank. <http://dx.doi.org/10.22617/FLS250523-3>
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2024). *Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2025–2029*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Eichengreen, B., Park, D., & Shin, K. (2012). *When fast-growing economies slow down: International evidence and implications*. *Asian Economic Papers*, 11(1), 42–87. https://doi.org/10.1162/ASEP_a_00118
- International Monetary Fund. (2025). *World economic outlook: Global Economy in Flux, Prospects Remain Dim*. <https://www.imf.org>
- Krugman, P. (1994). Competitiveness: A dangerous obsession. *Foreign Affairs*, 73(2), 28–44. <https://www.foreignaffairs.com>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). *OECD economic surveys: Japan 2019*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/eco_surveys-jpn-2019-en
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *Economic outlook for Southeast Asia, China and India 2023: Rebuilding growth*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/saeo-2023-en>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025). *OECD economic outlook (interim projections)*. OECD Publishing.
- Rodrik, D. (2011). *The globalization paradox: Democracy and the future of the world economy*. W. W. Norton & Company.
- Stiglitz, J. E. (2002). *Globalization and its discontents*. W. W. Norton & Company.
- Wade, R. (1990). *Governing the market: Economic theory and the role of government in East Asian industrialization*. Princeton University Press.
- World Bank. (2013). *China 2030: Building a modern, harmonious, and creative society*. World Bank. <https://www.worldbank.org>
- World Bank. (2019). *Malaysia economic monitor: Making ends meet*. World Bank. <https://www.worldbank.org>
- World Bank. (2020). *Aspiring Indonesia: Expanding the middle class*. World Bank. <https://www.worldbank.org>
- World Bank. (2023). *Global economic prospects*. World Bank. <https://www.worldbank.org>
- World Bank. (2024). *World development report 2024: Digitalization for development*. World Bank. <https://www.worldbank.org>
- World Bank. (2025). *World development indicators*. World Bank. <https://databank.worldbank.org>